

PATRONASE POLITIK DALAM KONSEP KEWARGANEGARAAN DI PESANTREN AR-RAUDLATUL HASANAH MEDAN

Prayetno, Windawati Pinem*, Muhammad Iqbal, Taufiq Ramadhan

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

* windawatipinem@unimed.ac.id

Abstract

This study aims to see political patronage in the concept of citizenship in the Ar-Raudlatul Hasanah Medan pesantren. Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah is one of the modern pesantren that has kiai as an important figure. However, the relationship between kiai and santri tends to be emotional, cultural, and forms patronage. Kiai is a patron who has power and influence. While santri is a client group that has a sami'na wa atho'na attitude. This patronage is not only in religious matters but also in political matters. Referring to the concept of citizenship, the patronage established between Kiai and Santri is considered contrary to democratic principles. This is because the political behaviour of students is still influenced by kiai figures. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic approach. Primary data is deep interviews. While secondary data is sourced from books and journals. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and FGDs. While the data validation technique uses the triangulation method. The results of the study found that political patronage in the Ponpes Ar-Raudlatul Hasanah took the form of half-hearted political patronage. The obedience of santri to kiai is limited to religious matters only, not in political matters.

Keywords: *patronage; political; citizenship; pesantren*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat patronase politik dalam konsep kewarganegaraan di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah merupakan salah satu pesantren modern yang memiliki kiai sebagai figur penting. Akan tetapi hubungan yang terjalin antara kiai dan santri cenderung bersifat emosional kultural dan membentuk patronase. Kiai merupakan patron yang memiliki *power* dan pengaruh. Sedangkan santri adalah kelompok *client* yang memiliki sikap *sami'na wa atho'na*. Patronase ini tidak hanya dalam urusan agama saja, melainkan juga dalam persoalan politik. Merujuk pada konsep kewarganegaraan, patronase yang terjalin antara kiai dan santri dianggap berlawanan dengan prinsip demokrasi. Hal ini dikarenakan perilaku politik santri masih dipengaruhi oleh figure kiai. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Data primer berupa *deep interview*. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan FGD. Sedangkan teknik validasi data menggunakan metode triangulasi. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa patronase politik di ponpes Ar-Raudlatul Hasanah berbentuk patronase politik setengah hati. Kepatuhan santri kepada kiai terbatas hanya dalam persoalan agama saja tidak dalam urusan politik.

Kata kunci: patronase; politik; kewarganegaraan; pesantren



PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat patronase politik dalam konsep kewarganegaraan di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Sebagai salah satu pesantren modern yang ada di wilayah Sumatera Utara, Ar-Raudlatul Hasanah berbeda dengan pesantren modern lainnya. Pesantren modern ini cenderung tertutup dengan pendatang dan sulit untuk bisa mendapatkan akses informasi. Sehingga untuk bisa bertemu dengan santri dan kiai harus melalui prosedur yang cukup rumit. Pesantren ini memiliki dua orang kiai yaitu KH. Rasyidin Bina dan KH. Solihin Adin yang sekaligus menjabat sebagai direktur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu hubungan yang terjalin antara kiai dan santri dianggap tidak seimbang karena bersifat emosional kultural. Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya membentuk sebuah pola patronase antara kiai dan santri. Kiai dianggap sebagai patron yang memiliki pengaruh dan *power* sehingga mampu mempengaruhi santri. Selain itu kiai merupakan figur kharismatik yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku politik santri (H. A. Aji, 2020). Sementara itu santri merupakan *client* yang memiliki sikap *sami'na wa atho'na* kepada kiai. Kepatuhan yang dimiliki oleh santri kepada kiai cenderung bersifat emosional kultural ketimbang rasional. Sehingga seringkali kepatuhan yang terbangun tidak hanya dalam persoalan agama saja melainkan juga tentang persoalan politik. Relasi inilah yang kemudian dinamakan sebagai patronase politik. Dalam konsep kewarganegaraan patronase politik yang terjalin antara santri dan kiai dianggap berlawanan dengan prinsip demokrasi. Hal ini dikarenakan perilaku politik santri masih dipengaruhi oleh figur kiai. Sehingga santri dianggap tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itulah membudayakan demokrasi di lingkungan pesantren dianggap penting. Adapun salah satu cara membudayakan demokrasi di pesantren yakni melalui pengembangan *civic disposition* santri (Syiaifurrahman & Erihadiana, 2022). *Civic disposition* dapat dilakukan dengan kegiatan yang melatih kejujuran, disiplin, cinta tanah air dan musyawarah (Pinem, Jamaludin, Iqbal, & Lincih, 2021).

Penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas dikarenakan hubungan yang terjalin antara santri dan kiai membentuk sebuah pola patronase. Dimana kiai sebagai patron, sedangkan santri sebagai *client*. Aspinall (2013) mengatakan patronase merupakan distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik secara khusus. Adapun sumber daya material di distribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal. Namun yang ingin dibahas dalam penelitian ini bukanlah terletak pada sumber daya material yang dimiliki oleh patron (kiai). Melainkan relasi kekuasaan personal yang dimiliki oleh patron sebagai kekuatan (*power*). Dimana pesantren sebagai jaringan politik non-formal memiliki relasi kekuasaan personal melalui figur kiai.

Adapun nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu patronase politik di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah berbentuk patronase setengah hati. Kiai tidak lagi menjadi rujukan bagi para santri dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Namun kepatuhan santri kepada kiai sebatas dalam persoalan agama saja. Kiai masih tetap menjadi pedoman bagi para santri untuk belajar agama, tetapi bukan untuk urusan politik. Penelitian ini juga berkontribusi kepada kajian kewarganegaraan yang melihat figure kiai tidak lagi sebagai patron dalam mempengaruhi perilaku politik santri. Santri memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya tanpa ada pengaruh dari kiai. Hal inilah yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini membantah hasil penelitian terdahulu yang

sudah pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Iwan Siswanto dan Erma Yulita menemukan bahwa pola paternalisme diantara kiai dan santri menyebabkan patronase sulit untuk dihilangkan (Siswanto & Yulita, 2019). Penelitian Misbah (2019) di pesantren Khalafi Ma'hadutholabah Babakan Tegal. Penelitian menemukan bahwa pola hubungan yang terbangun antara kiai dan santri di ponpes Ma'hadutholabah Babakan Tegal bersifat patronase politik plus. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterikatan kiai dan santri dalam pola patronase tidak memiliki batas waktu dan berjalan sepanjang hidup.

Pada dasarnya pesantren dapat didefinisikan secara terminologi dan etimologis. Secara terminologi pesantren dapat didefinisikan sebagai tempat dimana dimensi eksoterik (penghayatan secara lahir) Islam diajarkan (Azra, 1999). Ada juga yang mendefinisikan pesantren sebagai tempat belajar para santri. Istilah pesantren diduga berasal dari bahasa Tamil atau India yaitu *shastri*. Shastri diartikan sebagai guru mengaji atau orang-orang yang memahami buku-buku dalam agama Hindu. Namun ada juga yang menyebut bahwa pesantren berasal dari turunan kata *shastra* yang berarti buku suci (Dhofier, 2011). Pesantren di Indonesia khususnya yang ada di pulau Jawa lebih mirip dengan padepokan yaitu rumah petak sederhana yang dijadikan asrama bagi para santri. Tidak ada fasilitas mewah yang disediakan untuk para santrinya. Akan tetapi seiring terjadinya perkembangan zaman, kondisi ini mulai mengalami perubahan. Dimana pesantren di Indonesia mulai terbagi menjadi dua jenis, yakni pesantren modern dan tradisional. Sedangkan secara etimologis pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti tempat penginapan atau asrama. Dalam konteks Indonesia, pondok pesantren dapat dipahami sebagai tempat menampung santri atau pelajar yang jarak rumahnya jauh (Dhofier, 2011). Sedangkan santri atau murid adalah orang yang mempelajari agama dari seorang kiai/ustadz di pondok pesantren (Ridwan, 2010). Pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan yang menjadi milik masyarakat pribumi yang berkontribusi dalam membentuk masyarakat melek huruf dan melek budaya (Huisman & Noer, 1978). Pesantren menjadi tempat dikembangkannya nilai-nilai agama dan juga Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hendri, 2020).

Berdasarkan definisi diatas ada beberapa jenis pesantren yang dikenal di Indonesia, seperti pesantren tradisional (*salafi*), pesantren modern (*khalafi*) dan pesantren kombinasi (gabungan *salafi* dan *khalafi*). Pesantren salafi merupakan jenis pesantren tradisional yang masih berpedoman kepada kitab kuning. Dalam kehidupan pesantren tradisional kiai merupakan figur sentral yang sangat dihormati serta memiliki pengaruh yang kuat bagi santri dan lingkungan pesantren. Jenis pesantren ini banyak sekali ditemukan di pulau Jawa. Hal ini sedikit berbeda dengan pesantren khalafi yang sudah tidak lagi mengajarkan kitab kuning kepada para santrinya. Peran kiai juga tidak terlalu mendominasi. Namun bukan berarti kiai tidak dianggap penting, hanya saja perannya tidak seperti dalam pesantren tradisional. Sedangkan pesantren kombinasi merupakan gabungan antara salafi dan khalafi. Jenis pesantren ini masih menjadikan kiai sebagai figur sentral. Adapun yang membedakan jenis pesantren ini dengan yang lainnya adalah sudah memiliki pola pendidikan yang lebih modern.

Otoritas kekuasaan kiai juga dianggap *legitimate*. Kiai dianggap sebagai *decision maker* yang mampu memberikan solusi bagi perubahan sosial dalam masyarakat. Bahkan terkadang kiai dianggap ahli dalam segala hal. Begitu pentingnya kedudukan kiai dalam pesantren seolah memberikan legitimasi tentang otoritas kiai. Tidak hanya dalam persoalan agama, sosial dan pendidikan tetapi juga dalam hal politik. Hal inilah yang

membuat kiai mulai terlibat dalam urusan politik. Bahkan juga diminati sebagai magnet politik bagi para pencari kekuasaan. Apalagi setelah Orde Baru runtuh, gema reformasi membuka pintu kebebasan bagi pertumbuhan dan perkembangan politik Islam di Indonesia melalui pesantren. Oleh karena itu pesantren tidak hanya dilihat sebagai sebuah lembaga pendidikan dan dakwah saja. Melainkan juga sebagai mesin politik yang sering dimanfaatkan oleh aktor politik. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih melalui peran kiai. Pesantren menjadi instrumen politik non-formal yang biasanya digunakan oleh aktor politik untuk mendapatkan simpati pemilih. Sehingga pesantren dijadikan sebagai salah satu tujuan safari politik yang dilakukan oleh aktor politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian terpenting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Penelitian menempatkan posisi yang paling *urgent* dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan (Bungin, 2017). Peneliti dapat mengenali subjek, merasakan yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sehingga memahami *setting* fenomena yang sedang diteliti (Basrowi & Suwandi, 2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian etnografi merupakan metode penelitian yang fokus terhadap pengamatan terhadap kelompok disekelilingnya. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan kepada santri, kiai dan ustadz di lingkungan pesantren. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan FGD. Sedangkan validasi data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai data yang sudah diperoleh (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah merupakan satu dari sekian banyak pesantren modern yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pesantren ini menjadi salah satu pesantren terbesar yang ada di Sumatera Utara dengan jumlah santri sebanyak 2997 orang. Adapun sejarah pesantren Ar-Raudlatul Hasanah bermula dari kegiatan pengajian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sejak tahun 1970-an, budaya pengajian tersebut membahas masalah keislaman dan pembacaan wirid yasin hampir setiap minggu. Kondisi daerah tempat berdirinya pesantren yang masih dihuni oleh sedikit penduduk membuat kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah dan pengajian sering dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini terjadi karena belum adanya tempat ibadah khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain tidak adanya tempat ibadah, masyarakat sekitar juga kesulitan dalam fasilitas pendidikan agama untuk anak-anak. Dengan alasan-alasan itulah maka bapak H. Ahkam Tarigan mewakafkan tanahnya seluas 256,5 m pada tahun 1978. Dalam waktu yang hampir bersamaan bapak H. Mahdian Tarigan juga mewakafkan tanahnya seluas 243 m.

Bermodalkan tanah wakaf yang sudah disediakan maka pada saat itu dibangunlah sebuah musala sederhana oleh masyarakat sekitar. Musala sederhana ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sholat, mengaji dan lainnya. Berangkat dari musala sederhana inilah kemudian ide pembangunan pesantren dimulai. Seluruh kehidupan di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana-suasana yang disebut dengan Panca Jiwa. Adapun isi dari Panca Jiwa tersebut adalah:

1. Jiwa Keikhlasan

Dalam jiwa keikhlasan artinya berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keuntungan. Namun segala sesuatu perbuatan didasarkan atas niat baik kepada Allah Swt. Badan wakaf ikhlas mengayomi tanpa berharap apapun dari pesantren. Para pimpinan ikhlas untuk mengembang tugas dan tanggung jawab semata karena ibadah.

2. Jiwa Kesederhanaan

Kehidupan pesantren tentunya berbeda dengan kehidupan di lembaga pendidikan lainnya. Adapun salah satu ciri khas nya yaitu kesederhanaan yang dibangun dalam pesantren. Para santri dididik dan dibiasakan untuk hidup sederhana. Hal inilah yang sulit kita jumpai di lembaga pendidikan lainnya. Dibalik kesederhanaan ini terpancar jiwa yang besar, pantang menyerah. Dari sinilah karakter dan mental para santri mulai ditempah.

3. Jiwa Berdikari

Berdikari artinya artinya kemampuan dalam menolong diri Sendiri. Kemampuan berdikari merupakan bagian penting yang ditanamkan pesantren kepada para santrinya. Berdikari artinya tidak hanya sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingan bagi para santri, namun hal ini juga berlaku bagi pesantren yang harus mampu berdikari tanpa mengharapkan bantuan dari siapapun. Inilah yang disebut dengan *Zelp berdruiping System* (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama menggunakannya). Sehingga pesantren tidak bersifat kaku. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang ada dalam pesantren dapat dikerjakan sendiri.

4. Jiwa Ukhuwah Islamiah

Kehidupan di dalam pesantren identik dengan ikatan persaudaraan yang kuat. Segala suka dan duka dijalani secara bersama-sama dalam jalinan ukhuwah Islamiah.

5. Jiwa Bebas

Bebas berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup dan bebas dari pengaruh negatif di luar masyarakat. Jiwa bebas ini akan menjadikan santri berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kesulitan. Jiwa bebas jangan sampai disalah artikan sebagai sebuah pola kehidupan yang bebas (liberal). Bebas dalam hal ini artinya kebebasan dalam garis-garis positif yang masih dalam koridor ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagai salah satu pesantren modern yang berkembang di Sumatera Utara, Ar-Raudlatul Hasanah sebenarnya memiliki perbedaan dengan pesantren modern lainnya. Ponpes ini cenderung tertutup dalam menerima pendatang dari luar yang berkunjung kesana. Bahkan untuk mendapatkan akses informasi terkait pesantren sulit dilakukan. Sistem birokrasi yang bersifat kaku menjadikan ponpes ini sulit untuk berbagi informasi. Namun dari sistem kurikulum pendidikan, pesantren ini telah dilengkapi

dengan berbagai mata pelajaran umum dan internasional. Pesantren ini juga memiliki dua orang kiai yaitu KH. Solihin Adin yang sekaligus menjadi direktur pesantren dan KH. Rasyidin Bina. Kiai merupakan figure penting dan sangat dihormati oleh santri. Kiai seringkali dianggap sebagai warisan dari Nabi yang wajib untuk dipatuhi. Akan tetapi posisi kiai dalam pesantren tidaklah sama seperti guru pada umumnya. Santri dan kiai cenderung memiliki keterikatan emosional yang lebih kuat ketimbang lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah budaya *sami'na wa atho'na* yang artinya kami mendengar dan kami taat masih melekat di dalam kehidupan pesantren. Dalam QS : *An-Nisa Ayat 59* berbunyi " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu". Ulil Amri disini dapat merujuk kepada para guru dan ulama. Hal inilah yang membentuk keterikatan emosional antara kiai dan santri.

Di pesantren salafi (tradisional) kepatuhan santri kepada kiai misalnya dapat dilihat dalam mengkaji kitab kuning. Dimana biasanya santri akan mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kiai nya tanpa ada pertanyaan. Jadi santri wajib meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh kiai nya adalah sesuatu yang mutlak benar. Jika merujuk pada konsep demokrasi, tentunya hal ini adalah tindakan yang salah. Demokrasi merupakan sistem yang memberikan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat bagi warga negaranya. Sehingga ada benturan kecil yang dilahirkan dari pola kebiasaan dalam pesantren salafi dengan konsep demokrasi dan kewarganegaraan. Namun hal yang sedikit berbeda dijumpai di pesantren modern seperti Ar-Raudlatul Hasanah. Pesantren ini justru memberikan keterbukaan bagi para santri untuk hidup demokratis. Termasuk bertanya dan berdiskusi dengan kiai. Walaupun budaya *sami'na wa atho'na* tetap masih melekat erat dalam kehidupan santri di ponpes, tetapi tidak bersifat mengikat. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Siti Aisyah dan Arif Chasanudin. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa santri di pesantren Hasyim As'ari Bangsri Jepara telah diberikan pendidikan tentang pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara (Asiyah & Chasanudin, 2020). Pesantren modern ini merupakan salah satu pesantren yang fokus dalam mengangkat isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga jelas terlihat perbedaan signifikan antara pesantren salafi dengan pesantren modern dalam menerapkan konsep kewarganegaraan.

Tabel 1. Data Pondok Pesantren di Kota Medan Tahun 2021

No	Jenis Pondok Pesantren	Nama Pesantren
1	Ponpes Salafiyah	PP Lukmanul Hakim
2	Ponpes Umum (Modern)	PP Al Kautsar
3	Ponpes Umum (Modern)	Pondok Pesantren Ta'dib Assyakirin
4	Ponpes Umum (Modern)	Pondok Pesantren Usman Syarif
5	Ponpes Umum (Modern)	Pondok Pesantren Syarif
6	Ponpes Umum (Modern)	Pondok Pesantren Taman Pendidikan Islam (TPI)
7	Ponpes Umum (Modern)	PP. Raudhatul Hasanah

8	Ponpes Umum (Modern)	PP. Al Manar
9	Ponpes Umum (Modern)	PP. Nurul Azmi
10	Ponpes Umum (Modern)	PP. Sejahtera
11	Ponpes Umum (Modern)	PP. Al Falah

Sumber: Kementerian Agama, 2023

Kiai Sebagai Kekuatan Politik Pesantren

Pada awal terbentuknya pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang digunakan untuk belajar tentang agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu kini pesantren tidak hanya menjadi sebuah lembaga pendidikan agama saja, melainkan juga sebagai lembaga dakwah. Oleh karena itulah dalam sistem pendidikan Indonesia pesantren telah berjasa dalam dua hal yaitu mengubah sistem pendidikan yang bersifat aristokratis menjadi demokratis dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat. Pesantren juga dianggap sebagai lembaga pendidikan yang unik karena sistem pendidikannya berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Dimana kiai dan kitab kuning hanya dapat dijumpai di dalam pesantren. Selain itu yang membuat pesantren berbeda dengan sekolah lainnya yaitu komunitas pesantren yang relatif cukup mandiri. Santri dan kiai yang tinggal dan menetap di pesantren juga memiliki relasi emosional yang cukup kuat. Sehingga dibutuhkanlah sebuah penguatan watak kewarganegaraan bagi santri agar mampu memahami prinsip demokrasi (Abdinigrum & Supriyadi, 2023). Penguatan watak kewarganegaraan ini dapat dilakukan dengan metode ceramah yang dilakukan oleh kiai. Sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dilaksanakan oleh santri selama menetap di pesantren. Pesantren menjadi benteng terhadap narasi islamisme yang tetap teguh menjunjung nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila (H. A. Aji, 2020; W. S. Aji & Adnan, 2020).

Sebagai simbol peradaban Islam di Indonesia, pesantren memiliki *figure* penting dalam menjalankan kebijakannya yaitu kiai. Kiai berperan sebagai pemimpin yang kharismatik dan sangat dihormati. Adapun kelebihan yang dimiliki seorang kiai terletak pada otoritas kekuasaannya yang dianggap *legitimate*. Kekuasaan yang *legitimate* tersebut pada akhirnya membentuk sebuah pola patronase yang mengikat antara santri dan kiai. Kiai sebagai patron dan santri sebagai *client*. Hubungan patronase ini seringkali dianggap tidak seimbang dan berlawanan dengan prinsip demokrasi. Inilah yang menyebabkan kajian tentang hubungan antara santri dan kiai menjadi menarik untuk dibahas. Kajian tentang posisi kiai dalam masyarakat Indonesia sebenarnya pertama kali dibahas oleh Dhofier (2011). Menurutnya kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli agama Islam dan biasanya menjadi pimpinan pesantren yang mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santri. Ditinjau secara etimologis, kata kiai sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. Kata ini merujuk kepada tiga gelar. Pertama, kiai merupakan sebutan untuk benda-benda pusaka. Dimana dalam tradisi Jawa ada banyak benda yang dikaitkan dengan nama kiai. Kedua, gelar kiai ditujukan kepada orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat dikarenakan posisinya sebagai figur yang dihormati dalam masyarakat. Sehingga gelar tersebut sebenarnya merupakan sebuah penghargaan kepada tokoh masyarakat tersebut. Ketiga, gelar kiai diberikan kepada seseorang yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Selain itu kiai juga harus memiliki pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Istilah kiai muncul

pada masyarakat Jawa, sedangkan di beberapa daerah lain memiliki sebutan lain. Seperti di Nusa Tenggara Barat disebut sebagai tuan guru, di Aceh disebut dengan tengku.

Figur kiai yang begitu melekat dalam hati masyarakat membuat sosok kiai sangat mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kiai tidak hanya sebagai elit agama, melainkan mulai bertransformasi sebagai elit politik. Kiai dianggap memiliki kekuatan politik yang dominan dan berpengaruh terhadap struktur religi politik dalam struktur sosial masyarakat (Zamakhsyari & Muhtadi, 2020). Sehingga kiai muncul sebagai sosok yang penuh dengan daya tarik bagi para pengikutnya. Kondisi seperti ini ternyata menjadi lahan yang strategis bagi sekelompok orang untuk membangun kekuatan politik. Pengaruh kiai melalui pesantren menjadi magnet bagi sekelompok orang untuk sekedar bersafari politik. Walaupun pada awalnya kunjungan tersebut hanya meminta nasihat dan doa, tetapi tidak jarang berakhir dengan kepentingan politik. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para aktor/partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat. Namun pendekatan kepada pesantren dan kiai dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk membangun basis politik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syatori (2018) ditemukan bahwa ponpes Buntet yang merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa memiliki daya tarik politik. Hal ini dikarenakan pesantren merupakan sebuah lembaga yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sehingga pesantren seringkali diminati oleh politisi untuk mendapatkan dukungan. Hal ini dapat kita lihat ketika menjelang pemilu/pilkada suara kiai dan santri menjadi lahan perebutan oleh aktor/partai politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan basis dukungan politik yang kuat dari pemilih Islam. Apalagi mengingat pesantren melalui peran kiai adalah *vote getter* dalam pemilu. Kecenderungan ini ternyata memiliki dampak positif dan juga negatif. Di satu sisi dilibatkannya pesantren melalui santri dan kiai dapat memperluas akses politik dikalangan Islam sendiri. Artinya, pemilih Islam menjadi prioritas melalui perluasan pengaruh Islam dalam kelompok/partai politik. Namun di sisi lain hal ini juga bisa mengakibatkan fragmentasi politik. Fragmentasi politik ini terjadi di kalangan Islam sendiri dengan munculnya oportuniste politik seperti yang pernah terjadi di tahun 1950.

Namun setelah Orde Baru runtuh, reformasi membuka kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan politik Islam. Salah satunya dengan maraknya pertumbuhan partai politik dengan *platform* Islam. Fenomena lahirnya partai-partai politik Islam tersebut dilatarbelakangi oleh 4 faktor (Romli, 2004), yaitu:

- a. Faktor teologis. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan *din wa daulah* dalam islam, yaitu agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pandangan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah kekuasaan politik dalam upaya menerapkan syariat dan hukum Islam.
- b. Faktor sosiologis. Faktor ini erat kaitannya dengan jumlah masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkanlah sebuah wadah untuk bisa menampung aspirasi masyarakatnya. Dengan lahirnya partai-partai politik Islam diharapkan mampu mewadahi semua aspirasi politik umat muslim di Indonesia.
- c. Faktor historis. Munculnya partai politik islam setelah reformasi sebenarnya memperkuat posisi organisasi/ parpol islam yang sudah ada sebelumnya, seperti NU dan Sarikat Islam. Organisasi dan parpol tersebut telah berjasa dalam masa

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga tidak luput dari kekuatan dan dukungan dari kiai dan santri.

- d. Reformasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa reformasi adalah masa dimana kebebasan mulai terbuka lebar. Reformasi yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, maka dibutuhkanlah wadah untuk bisa menampungnya.

Ketertarikan umat Islam kepada partai politik bukan saja disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan Islam, tetapi lebih karena adanya tipologi umat Islam dalam memandang hubungan politik dengan Islam (Bolland, 1971). Ada tiga tipologi dalam berpolitik ketika dihadapkan dengan Islam, yaitu, tipologi ideologis, kharismatik, dan rasional.

- a. Dalam tipologi ideologis, umat Islam memposisikan berpolitik sama dengan beragama Islam. Semangat politik sama dengan semangat membela Islam. Sehingga sangat dianjurkan untuk selektif dalam memilih partai politik.
- b. Tipologi kharismatik diartikan sebagai dalam memilih partai politik biasanya umat Islam akan mengikuti nasehat dari figure panutannya. Figure yang menjadi panutan tersebut menjadi cermin bagi umat islam dalam mengambil keputusan. Kekaguman ini ternyata berdampak terhadap sulitnya umat Islam untuk bersikap rasional.
- c. Tipologi rasional artinya kemampuan umat Islam dalam memilih partai politik benar-benar didasarkan atas rasionalitas. Memilih atau tidak memilih lebih cenderung didasarkan atas kualitas dari partai politik yang akan dipilih.

Berdasarkan tipologi tersebut dapat dilihat bahwa kondisi masyarakat muslim yang ada di Indonesia cenderung masih berada di tipologi satu dan dua yaitu tipologi ideologis dan kharismatik. Dalam tipologi yang pertama, umat muslim terlibat dalam politik sama artinya dengan membela agama Islam. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan aktor-aktor politik Islam. Berdasarkan pandangan ini sama artinya dengan terlibat dalam politik adalah salah satu bentuk jihad. Hal inilah yang saat ini masih sering kita jumpai dalam masyarakat Indonesia. Selain itu umat muslim di Indonesia juga cenderung berada dalam tipologi yang kedua. Memilih partai politik karena terpengaruh dengan figure yang menjadi panutan. Biasanya *figure* seperti ini ada di pesantren yaitu kiai. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sosok kiai memiliki pengaruh yang cukup kuat didalam masyarakat. Figure kharismatik, paham ilmu agama dan tidak jarang dianggap sebagai solusi atas perubahan sosial di masyarakat menjadikan kiai mudah memberikan pengaruhnya. Sehingga dengan dua tipologi diatas maka ketika muncul persoalan yang menyangkut umat Islam, yang muncul untuk menyelesaikan persoalan tersebut bukan dari kalangan profesional. Melainkan diambil alih oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh secara keagamaan seperti kiai. Selain karena faktor kharismatik, kekuatan politik yang dimiliki kiai berasal dari jejaring sosial yang terikat secara internal dan eksternal pesantren, yang meliputi jaringan geneologis, ideologis dan intelektual (Noor, 2019). Adapun jejaring internal biasanya didapat dari kalangan santri yang memiliki sikap patuh kepada kiai. Sedangkan jejaring internal biasanya ditemukan dari organisasi-organisasi Islam, partai politik Islam dan masyarakat. Kedua jejaring ini dianggap sebagai kekuatan bagi kiai dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Patronase Politik Setengah Hati di Ponpes Raudlatul Hasanah

Adapun salah satu ciri khas yang ada dalam kehidupan pesantren yaitu terdapatnya relasi patronase antara kiai dan santri. Relasi ini bisa berkembang dikarenakan keterikatan emosional kultural yang dimiliki santri dan kiai. Kiai sebagai *figure* kharismatik sebagai patron, dan santri yang memiliki kepatuhan kepada kiai sebagai *client*. Pola hubungan ini dianggap tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu kelompok superior (patron). Namun seiring perkembangan zaman, *figure* kiai di pesantren modern mulai mengalami pergeseran. Kepatuhan santri terhadap kiai mulai menurun yang dikarenakan peran kiai juga semakin menurun. Penurunan kepatuhan santri bukan berarti santri menjadi tidak hormat kepada kiai, akan tetapi dalam relasi politik santri mulai bersikap rasional. Masuknya arus demokratisasi dianggap sebagai pembuka keterbukaan hubungan antara santri dan kiai menjadi lebih rasional. Santri mulai mampu mengkritisi apapun yang dilakukan oleh kiai (Setiawan, 2013). Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang didalamnya harus menerapkan nilai-nilai demokrasi (Anam, Degeng, Murtadho, & Kuswandi, 2019). Hal inilah yang dirasakan di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Dinamika patronase politik yang terjadi antara kiai dan santri telah mengalami pergeseran. Kiai tidak lagi menjadi *cultural broker* maupun *political broker*. Kiai kini tampil sebagai *figure* yang justru menawarkan sikap demokratis.

Kiai tidak lagi menjadi *figure* yang berpengaruh dalam menentukan perilaku politik santri. Inilah yang dinamakan patronase politik setengah hati. Adapun maksud dari pola patronase politik yang terjadi di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yaitu santri masih menjadikan kiai sebagai *figure* penting dalam kehidupan mereka, namun bukan menjadi aktor dalam mempengaruhi perilaku dan pilihan politik mereka. Hal ini dikarenakan arus demokratisasi yang mulai masuk dan berkembang di dalam pesantren. Hal ini dilihat dari keterbukaan pesantren untuk dikunjungi oleh para aktor politik. Akan tetapi pesantren tetap melarang untuk dijadikan sarana kampanye politik. Kedatangan aktor politik dibatasi hanya untuk memberikan pengetahuan politik kepada santri. Sehingga para santri mampu menentukan pilihan politiknya. Harapannya adalah santri menjadi pemilih yang rasional (*rational choice*). Oleh karena itu peran kiai dalam pesantren tidak memiliki kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Ketaatan dan kepatuhan santri kepada kiai hanya terbatas dalam persoalan agama saja. Tidak termasuk dalam urusan politik. Persoalan politik dianggap sebagai urusan personal bagi para santri dan tidak boleh ada yang mencampuri termasuk kiai.

Gambar 1. Pola Budaya Patronase Politik



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Demokratisasi dalam lingkungan pesantren Ar-Raudlatul Hasanah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah ada beberapa pesantren yang terlebih dahulu melakukan demokratisasi di lingkungannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Asiyah & Chasanudin (2020) di ponpes Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. Di ponpes ini para santri telah dibekali dengan dakwah politik yang dilakukan oleh kiai. Adapun dakwah politik yang dilakukan bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan para santri. Pembekalan dakwah politik yang dilakukan di Ponpes Hasyim Asy'ari Bangsri merupakan bagian dari keterbukaan terhadap konsep demokrasi dalam tubuh pesantren. Sehingga para santri mampu menjadi pemilih yang rasional. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2016) tentang demokrasi pesantren. Menurutnya keterlibatan pesantren dengan politik bertujuan untuk memajukan kemaslahatan umat. Politik pesantren merupakan politik yang cinta perdamaian (Yahya, 2016). Artinya dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa menanamkan nilai-nilai demokrasi menjadi hal penting di pesantren. Ditanamkannya nilai-nilai demokrasi kepada santri pada akhirnya membentuk pola perilaku politik yang rasional. Sehingga santri tidak lagi memilih karena pengaruh 'figure'. Patronase politik yang berkembang di ponpes Ar-Raudlatul Hasanah pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku politik santri. Menurut Syarif (2012) ada beberapa jenis bentuk perilaku politik santri, yaitu:

1. Santri Patuh Mutlak

Dalam menjalani kehidupan di pesantren, santri memiliki keterikatan yang begitu kuat dengan para kainya. Kiai merupakan guru sekaligus orang tua selama berada di dalam pesantren. Dalam menyebarkan ilmu tak jarang kiai dianggap sebagai sumber informasi yang bersifat satu pintu. Artinya kiai adalah sosok yang dianggap terpercaya dalam memberikan informasi kepada santrinya. Kepatuhan yang dimiliki oleh santri membuat segala informasi yang diberikan dipatuhi dengan mutlak tanpa keraguan.

2. Santri Patuh Semu

Santri yang memiliki sikap keteladanan terhadap kiai dalam berbagai aspek moral, agama dan sosial. Dalam kondisi ini santri menyerap informasi tidak hanya dari kiai dan pesantren. Seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa kesadaran yang dimiliki oleh santri sebagai *false consciousness* atau kesadaran palsu (Mulkhan, 1992).

3. Santri Prismatic

Santri prismatic merupakan santri yang telah mengalami proses transisi dari sikap tradisional menjadi modern. Kiai tidak lagi menjadi agen tunggal dalam menyerap berbagai informasi politik. Sehingga perilaku politik santri tidak dipengaruhi oleh figure kiai. Namun keterikatan santri dengan kiai tidak bisa dilepaskan dalam persoalan agama. Kiai masih menjadi sumber rujukan utama bagi para santri untuk belajar tentang sosial keagamaan. Adapun jenis perilaku politik santri di ponpes Ar-Raudlatul Hasanah yaitu santri primastik. Dimana kepatuhan terhadap kiai hanya dalam persoalan agama saja, bukan dalam urusan politik.

Oleh karena itu patronase politik setengah hati di pesantren Ar-raudlatul Hasanah dianggap berjalan sesuai dengan konsep kewarganegaraan. Kiai merupakan fasilitator berjalannya demokrasi dalam pesantren. Sehingga menghasilkan santri prismatic yang tidak terpengaruh kepada kiai dalam urusan politik. Hal ini terbukti dari keikutsertaan para santri dalam kegiatan pesta demokrasi, seperti pemilu, pilkada dan pilkades. Seperti

yang dikatakan oleh Stokke, bahwa salah satu bagian penting untuk masuk dalam dimensi kewarganegaraan yaitu ikut berpartisipasi. Ada 4 dimensi kewarganegaraan menurut Hiariej & Stokke (2022), yaitu:

- a. Keanggotaan: Adapun substansi dari dimensi ini yaitu menjadi bagian dari sebuah komunitas yang terus mengalami perkembangan. Keanggotaan dalam konteks kewarganegaraan bersifat lebih luas.
- b. Status Hukum: Dalam dimensi ini berkaitan dengan hak dan kewajiban antara individu dan negara. Warga negara bisa mendapatkan status hukum melalui beberapa cara, seperti pernikahan dengan warga negara tertentu, status kewarganegaraan orang tua dan wilayah kelahiran.
- c. Hak. Adapun jenis hak dalam konsep kewarganegaraan adalah hak sipil, sosial dan politik. Negara dianggap memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dari setiap warga negaranya.
- d. Partisipasi. Pada dimensi ini menekankan sifat kewarganegaraan yang aktif dalam kegiatan negara. Keikutsertaan warga negara dalam kegiatan negara harus tanpa paksaan dan bersifat sukarela. Dengan begitu dimensi kewarganegaraan dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi.

SIMPULAN

Patronase politik yang berkembang di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah merupakan patronase politik setengah hati. Patronase politik setengah hati merupakan bentuk relasi politik yang terjalin antara kiai dan santri di pesantren. Kiai masih menjadi figure yang sangat disegani, namun tidak memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku politik santri. Dalam konsep kewarganegaraan patronase politik setengah hati menunjukkan sikap keterbukaan sesuai dengan prinsip demokrasi. Sejak arus modernisasi dan demokrasi berkembang dalam dunia pesantren, kini kiai tidak lagi menjadi rujukan dalam persoalan politik. Para santri mulai bertransformasi menjadi pemilih yang rasional serta tidak terpaku kepada peran kiai. Kepatuhan santri kepada kiai dalam pola patronase setengah hati ini hanya berkisar dalam urusan keagamaan. Hubungan yang terjalin antara kiai dan santri layaknya seperti hubungan guru dan murid, tidak bersifat *longlife*. Sehingga kiai tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada para santri terutama dalam urusan politik. Tidak ada keterikatan yang kuat dan mutlak kepada kiai, seperti yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Kiai tidak lagi menjadi rujukan dalam menentukan perilaku politik santri. Kepatuhan yang dimiliki santri terbatas hanya dalam persoalan sosial agama saja, tidak dalam persoalan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tulisan ini. Ungkapan terimakasih kami berikan kepada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan penelitian. Terima kasih juga kepada jurusan PPKn, Universitas Negeri Medan yang ikut mendukung terlaksananya penelitian ini. Tidak lupa kepada seluruh mahasiswa PPKn Unimed yang berperan serta dalam menyelesaikan penelitian. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdinigrum, A. R., & Supriyadi. (2023). Penguatan Watak Kewarganegaraan Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R Krpyak Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 13–26. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.41016>
- Aji, H. A. (2020). Narasi Islamisme dan Pesantren: Pola Penolakan Islam Politik di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15(2), 85–94. <https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1623>
- Aji, W. S., & Adnan, M. (2020). *Hubungan Peran Kiai, Perilaku Pemilih dengan Pilihan Masyarakat Banjarnegara Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018*. Universitas Diponegoro.
- Anam, S., Degeng, I. N. S., Murtadho, N., & Kuswandi, D. (2019). The Moral Education and Internalization of Humanitarian Values in Pesantren: A Case Study from Indonesia. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(4), 815–834. <https://doi.org/10.17478/jegys.629726>
- Asiyah, S., & Chasanudin, A. (2020). Pondok Pesantren dan Dakwah Politik: Kajian Histori Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 27–39. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5296>
- Aspinall, E. (2013). A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Bolland, B. J. (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia: Slightly Revised Reprint*. <https://doi.org/10.1163/9789004286894>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hendri. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2022). Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia. In *The Politics of Citizenship in Indonesia* (hal. 1–16). https://doi.org/10.1007/978-981-16-7955-1_1
- Huisman, A. J. W., & Noer, D. (1978). The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942. *Journal of the American Oriental Society*, 98(2), 168–169. <https://doi.org/10.2307/600979>
- Misbah, M. (2019). Relasi Patronase Kiai-Santri dalam Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Ma'hadutholabah Babakan Tegal. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat*,

- Religi, dan Tradisi*), 5(2), 213–227. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.817>
- Mulkhan, A. M. (1992). *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Siperss.
- Noor, M. (2019). Gaya Kepemimpinan Kyai. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 141–156. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2958>
- Pinem, W., Jamaludin, J., Iqbal, M., & Lincah, M. (2021). Instilling Civic Disposition Values through Scouting Activities at SMP PAB 9 Klambir Lima Kebun, Deli Serdang. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 82–91. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4558>
- Ridwan, N. (2010). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 29–48.
- Setiawan, E. (2013). Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 13(2), 137–152. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>
- Siswanto, I., & Yulita, E. (2019). Eksistensi Pesantren dengan Budaya Patronase (Hubungan Kiai dan Santri). *MITRA ASH-SHIBYAN: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 87–107. <https://doi.org/10.46963/mash.v2i1.27>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifurrahman, & Erihadiana, M. (2022). Nilai-Nilai Demokrasi Ala Pesantren sebagai Pembentuk Karakter Insanul Kamil di Pesantren Islam Hidayatunnajah Bekasi. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 673–679. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.483>
- Syarif, Z. (2012). Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 19–30. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v7i1.376>
- Syatori, A. (2018). Tafsir dan Ijtihad Politik Pesantren: Suatu Perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 4(2), 350–383. <https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552>
- Yahya, I. (2016). Demokrasi Pesantren: Menebar Format Politik Yang Damai. *At-Taqaddum*, 6(2), 187–205. <https://doi.org/10.21580/at.v6i2.713>
- Zamakhsyari, A., & Muhtadi, A. S. (2020). Elit Agama dan Gerakan Sosial Pada Masyarakat Cirebon. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 168–181. <https://doi.org/10.24235/empower.v5i2.7244>